

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PALANGKA RAYA

ASWIN SEBASTIAN HUGO SILAM

NPP. 30.0946

Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

Program Studi Kebijakan Publik

Email : aswinsebastianhugosilam@gmail.com

ABSTRACT

Problems/ Background (GAP): The author focuses on a series of activities that can assess or examine the Waste Management Policy in the City of Palangka Raya. **Purpose:** To describe the Evaluation of Waste Management Policy in Palangka Raya City, Central Kalimantan Province. **Methodology:** This study uses qualitative methods and is analyzed by William N Dunn's theory (2003). Techniques to collect data by observation, interviews and documentation. **Results/ Findings:** The results of the study show that the Evaluation of Waste Management Policy in Palangka Raya City, Central Kalimantan Province has fulfilled the Evaluation theory according to William N Dunn. However, there are still unexpected findings in the field, such as lack of public awareness, lack of infrastructure, work programs that are considered ineffective, and lack of outreach to the community. **Conclusion:** The implementation of Waste Management in Palangka Raya City, Central Kalimantan Province is going quite well by being able to survive with the existing programs well and there are several things that need to be improved and improved.

Keywords: Policy Evaluation, Waste Management, Reuse, Reduce, Recycle

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP) : Penulis berfokus pada serangkaian kegiatan yang dapat menilai atau menelaah Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Palangka Raya. **Tujuan:** Untuk mendeskripsikan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. **Metodologi :** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dianalisis dengan teori William N Dunn (2003). Teknik mengumpulkan data dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. **Hasil/ Temuan :** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sudah memenuhi teori Evaluasi menurut William N Dunn. Namun, masih ada temuan yang tak terduga di lapangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sarana prasarana, program kerja yang dinilai kurang efektif, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. **Kesimpulan :** Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah berjalan dengan cukup baik dengan mampu bertahan dengan program yang ada dengan baik serta ada beberapa hal yang harus ditingkatkan serta diperbaiki. **Kata Kunci :** Evaluasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Reuse, Reduce, Recycle

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sampah harus dilakukan dengan menyeluruh dan terintegrasi, bermula dari pengumpulan hingga pengolahan. Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah, kerja sama yang sangat baik diperlukan dari pemerintah, masyarakat, dan unsur terkait lainnya. Usaha yang dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya untuk menjaga kebersihan dan lingkungan, tidak hanya sebatas dalam pengadaan sarana prasarana, tetapi juga menetapkan kebijakan terkait pembangunan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan dengan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangka Raya Nomor: 01 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan. Untuk mengimplementasikan Perda tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya menetapkan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Lingkungan.

Perda dan Peraturan Walikota tersebut digunakan sebagai instrumen kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan pengelolaan sampah dan kebersihan yang baik serta berwawasan lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017, pengelolaan sampah terbagi atas dua kegiatan indikator yaitu penanganan dan pengurangan sampah di antaranya menggerakkan operasional Bank Sampah yang sudah dibentuk. Serta tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R). Di sisi lain persediaan kontainer depo sampah atau tempat pembuangan sampah (TPS), di lingkungan masyarakat, agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP)

Permasalahan yang ditemukan berkaitan dengan proses Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dapat berupa kejadian maupun hal diluar kendali. Beberapa permasalahan yang ditemukan peneliti diantaranya Kurangnya kesadaran dari masyarakat yang berdampak kepada pembuangan sampah sembarangan serta acuhnya pemilahan sampah dari masyarakat. Selain itu kurangnya sarana prasarana penunjang untuk pengelolaan sampah dan program sosialisasi pengelolaan sampah yang minim dari pemerintah kepada masyarakat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Agung Prasetya Mayangkara, ST (Sekretariat Pemkab. Tuban) (2016), mengenai Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban yang memiliki dan Perbedaaan Penulis sebelumnya menggunakan landasan hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan ingin melakukan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Gunung Panggung Kabupaten Tuban. Penulis sebelumnya menggunakan analisis secara kualitatif terhadap data - data hasil evaluasi baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif/tidak terukur/yang tidak dapat dijelaskan melalui analisis kuantitatif. Sedangkan Penulis menggunakan landasan hukum Peraturan Daerah Kota Palangka

Raya Nomor: 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, serta Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Lingkungan. Berdasarkan kebijakan tersebut, Penulis ingin melakukan evaluasi kebijakan dengan teknik analisis data melalui proses wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian kedua dilakukan oleh Mohammad Rendy (Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako) (2015), dengan judul Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Palu dengan Penulis sebelumnya menggunakan landasan hukum Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dan ingin melakukan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palu. Sedangkan Penulis menggunakan landasan hukum Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, serta Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Lingkungan. Penelitian ketiga dilakukan oleh Junaidy dkk, FISIP Universitas Islam Kalimantan MAAB Banjarmasin Prodi Manajemen Universitas Cahaya Bangsa Banjarmasin) (2021), Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kapuas Penulis sebelumnya menggunakan landasan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah ingin melakukan evaluasi kebijakan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kapuas. Sedangkan Penulis menggunakan landasan hukum Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor: 01 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, serta Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Lingkungan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya dengan Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu peneliti menemukan adanya persamaan dan perbedaan yaitu dimana penelitian mengenai pengelolaan sampah, dilakukan di intansi Dians Lingkungan Hidup dengan metode deskriptif kualitatif, sedangkan yang menjadi perbedaannya ialah konsep, lokasi penelitian, luang lingkup dan fokus penelitian. Selain itu peneliti menggunakan teori Evaluasi William N Dunn (2003) yang menyatakan bahwa model evaluasi ini merupakan pendekatan secara focus kepada nilai evaluasi yang mempertimbangkan fakta dengan orientasi masa kini dan lampau sehingga memunculkan sebuah rekomendasi dengan 6 parameter yakni, Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan Sampah di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengan, mengkaji hambatan serta memahami bagaimana nilai yang ada dalam teori evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dianalisis dengan teori William N Dunn (2003). Teknik mengumpulkan data dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Penulis menggunakan sumber data primer berupa wawancara dengan narasumber dan observasi sedangkan data sekunder berupa data pendukung seperti sumber literatur atau dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Penentuan narasumber ditentukan dengan teknik purposive sampling, artinya informan yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan desain penelitian, dan informan yang dipilih terdapat wakil-wakil dari lapisan populasi sehingga informan memiliki esensial dianggap cukup mewakili. Informan berjumlah 24 orang lalu penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menggunakan teori Evaluasi William N Dunn (2003) yang menyatakan bahwa model evaluasi ini merupakan pendekatan secara focus kepada nilai evaluasi yang mempertimbangkan fakta dengan orientasi masa kini dan lampau sehingga memunculkan sebuah rekomendasi dengan 6 parameter yakni, Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

3.1 Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

a. Efektivitas

Efektivitas tercapainya hasil yang diharapkan DLH dalam pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang direncanakan, akan tetapi pencapaian tujuan yang ditetapkan belum efektif atau belum terlaksana dengan baik. Untuk pengelolaan sampah dengan sistem 3R (Reuse, Reduce, Recycle) pemerintah punya kebijakan dan program tapi jika 3R dapat dilaksanakan dari sumber (masyarakat) sampah itu sendiri maka timbulan sampah yang tidak terkelola di Kota Palangka Raya akan berkurang secara signifikan. Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Palangka Raya

b. Efisiensi

Menurut pandangan peneliti efisien sosialisasi pengelolaan sampah belum efisien dilakukan, dilihat dari masih banyak masyarakat yang masih membuang sampah ditanah kosong, ini menunjukkan kurangnya sosialisasi serta kesadaran masyarakat Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh DLH kota Palangka Raya masih kurang karena menurut pendapat masyarakat masih sering melihat jika ditanah kosong sering masyarakat membuang sampah sembarangan, perlu ditindak lanjuti untuk sosialisasi serta sanksi bagi masyarakat

c. Kecukupan

Peneliti memahami kecukupan menurut William N Dunn sebagai Pencapaian hasil harus memenuhi Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya kecukupan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya sudah mulai cukup memadai dimana sarana TPS

hampir merata disetiap pemukiman warga, dan jadwal pengangkutan sampah juga sudah teratur dan masyarakat membuang sampah teratur sesuai waktu dan peraturan yang berlaku

d. Perataan

Pemerataan tempat pembuangan Kecamatan Jekan Raya merupakan daerah dengan tempat pembuangan terbanyak yaitu sebanyak 64 tempat pembuangan dengan posisi terbanyak kedua merupakan Kecamatan Pahandut dengan jumlah 22 tempat pembuangan kemudian dengan jumlah paling sedikit berada di Kecamatan Bukit Batu 5 dan 4 tempat pembuangan di Kecamatan Sebangau.

e. Responsivitas

Telah dibuat bagian pengaduan lingkungan di website DLH yang langsung terhubung ke admin pengaduan DLH. Pengaduan tersebut akan dilanjutkan ke bidang yang menangani seperti ke bidang persampahan. Selanjutnya, tim akan melakukan pengecekan terhadap pengaduan tersebut, melakukan penanganan terhadap pengaduan tersebut, dan menjawab hasil pengaduan masyarakat.

Dengan ketersediaan website sebagai bentuk tempat keluhan yang bisa digunakan oleh masyarakat terkait dengan permasalahan sampah Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa responsivitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya cukup cepat tanggap terhadap keluhan masyarakat tentang permasalahan sampah.

Hal ini dapat dilihat bahwa telah disediakan bentuk layanan call center untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan pelaporan terkait permasalahan persampahan ini. Melalui laporan dari website tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya secepat mungkin akan menindak lanjuti secepat mungkin, hanya saja dari hasil wawancara dengan masyarakat kurangnya sosialisasi mengenai adanya website ini sehingga masyarakat kurang tau mengenai adanya website tersebut, diharapkan agar Dinas Lingkungan Hidup lebih gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih banyak tau tentang website tersebut

f. Ketepatan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa ketepatan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLH Kota Palangka Raya terkait dalam hal waktu telah direncanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan sampah di TPS, sehingga apabila waktu pengangkutan seluruh sampah dapat terangkut. Namun untuk melaksanakan hal tersebut DLH memerlukan dukungan dan kesadaran dari masyarakat untuk membantu kinerja mereka menjadi lebih baik yaitu dengan membuang sampah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh DLH ataupun pihak ketiga dengan membuang sampah yang memang pada tempatnya.

3.2 Faktor Penghambat Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

Permasalahan yang ditemukan peneliti diantaranya Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah di lingkungan sekitar, kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat untuk

pengelolaan sampah rumah tangga, dan program pemerintah Kota Palangka Raya dianggap masih kurang dalam mengelola sampahnya.

3.3 Langkah Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangakaraya dalam mengelola sampah

Hasil dari analisis dan wawancara penulis menemukan bahwa Merujuk pada faktor penghambat yang telah diidentifikasi. Upaya Pemerintah kota Palangka Raya agar pengelolaan sampah meningkat setiap tahunnya dengan upaya melalui program pemerintah serta dana yang ada pemerintah berupaya meningkatkan sarana dan prasana yang ada, serta berupaya juga secara bertahap melakukan sosialisai kepada masyarakat tentang manfaat dan pentingnya pengelolaan serta pemilahan sampah

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sebagai upaya dalam diskusi temuan utama dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya ke arah yang lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka berdasarkan hasil penelitian, peneliti berharap Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya mampu untuk :

1. Meningkatkan Pelatihan Pengelolaan Sampah Kepada Masyarakat

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya lebih gencar lagi memberikan edukasi kepada masyarakat yaitu pentingnya kebersihan dan pengolahan sampah menggunakan program yang mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatannya, sehingga terbangunnya kesadaran pada masyarakat akan pentingnya kebijakan pengelolaan sampah yang telah ditetapkan.

2. Perawatan Sarana dan Prasarana

Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya secepatnya memperbaiki TPS yang telah rusak, agar sarana dan prasarana akses untuk membuang sampah masyarakat tercukupi.

3. Mengaktifkan Kembali Bank Sampah

Mengaktifkan kembali bank sampah dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memilah sampah

IV. KESIMPULAN

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya sudah melakukan program dengan baik hanya saja harus dibarengi dengan pembenahan yang pula terhadap masalah yang ada dalam mengelola sampah di Kota Palangka Raya.

Peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian bahwa Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah menurut teori yang dikemukakan oleh William N Dunn berdasarkan 6 (enam) Parameter penilaian/assesmen/evaluasi kebijakan khususnya dalam penelitian ini berdasarkan Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan dapat dikatakan cukup baik dengan faktor pendukung maupun penghambat

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian hanya dilaksanakan selama dua minggu dan peneliti memiliki keterbatasan terjun ke lapangan dikarenakan program di lapangan masih minim.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pejabat-pejabat terkait di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya yang memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU BUKU

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

Miles, Hubberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode - Metode Baru*. Jakarta: UIP.

PERATURAN PERUNDANGAN

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan

Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 43 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Lingkungan

PENELITIAN

Mayangkara, Agung Prasetya. 2016. "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Tpa Gunung Panggung Kabupaten Tuban". JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik. Vol. 2 427-444

Rendy, Mohammad. 2015. "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Palu"

Junaidy, Sugiannor, Dely Anhar, Akhmad Nikhrawi Hamdie, Syahrial Saddiq. 2021. "Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kapuas" AS-SIYASAH Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. 6(2):40-49